

JURNAL

UPAYA POLISI DALAM MENGGUNGKAP TINDAK PIDANA KEKERASAN

DALAM RUMAH TANGGA



Disusun oleh :

DEDY SANDRO LAGIADUAY

NPM : 080509824

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian

Sengketa Hukum

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2015

**UPAYA POLISI DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA**

Diajukan oleh :

DEDY SANDRO LAGIADUAY

NPM : 080509824

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan: Peradilan dan Penyelesaian

Sengketa Hukum

Dosen Pembimbing



G. Aryadi, SH, MH

Dekan Fakultas Hukum



Universitas Atma Jaya Yogyakarta

**FAKULTAS
HUKUM**

FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.

ABSTRACT

Domestic violence is any act against someone, especially the women who resulted in suffering phy, sexual, psychological and others. Domestic violence is not a new phenomenon in the society and families because of it is often happened and thrive in the society. In this case the most dominant victims are women (wives) even though there are other victims such as children husbands and others who work as domestic servants. The factors that caused domestic violence, are poor communication between husband and wife, disharmony in the household, wife errors, as well as the husband's inability to meet the economic needs of the family. With the problems that have been studied, so it is expected to the police efforts in revealing the crime of domestic violence with the type of study is a normative law research which refers to the positive law in the form of legislation in force in Indonesia. Based on the results of research in the polda DIY, there are some socializations of the institutions involved. One of them is Directorate of BINMAS POLDA DIY. It told a briefing to the cadres in the form of socialization and assisted by institutions related namely the institution Legal Aid (LBH) and non governmental organizations (NGO) as well as the role of RT/RW directly within the family and society.

keywords: Police, Prevention, Barriers, domestic violence.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak kekerasan dalam masyarakat sebenarnya bukan suatu hal yang baru. Kekerasan sering dilakukan bersama dengan salah satu bentuk tindak pidana, seperti yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum pidana (KUHP) misalnya pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), perkosaan (Pasal 285 KUHP) dan seterusnya.

Tindak pidana tersebut dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, sedangkan cara bagaimana kekerasan dilakukan atau alat apa yang dipakai, masing-masing tergantung pada kasus yang timbul. Perbuatan tersebut dapat menimpa siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, dari anak-anak sampai dewasa namun, yang menarik perhatian publik adalah kekerasan yang menimpa kaum perempuan (istri).

Apalagi kalau kekerasan tersebut terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga yang menjadi korban adalah kaum perempuan dan anak. Dalam kenyataannya sangatlah sulit untuk mengukur secara tepat luasnya kekerasan terhadap perempuan, karena ini berarti harus memasuki wilayah peka kehidupan perempuan, yang mana perempuan sendiri enggan membicarakannya. Tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah bersama.

Kekerasan terhadap perempuan adalah perwujudan dari ketimpangan hubungan kekerasan antara laki-laki dan perempuan sepanjang sejarah, yang mengakibatkan dominasi dan diskriminasi terhadap perempuan oleh laki-laki

Terbatasnya peluang perempuan untuk mencapai persamaan hukum, sosial, politik, dan ekonomi dalam masyarakat, antara lain karena berlanjutnya dan endemiknya kekerasan. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, perlu adanya suatu definisi yang jelas dan menyeluruh tentang kekerasan terhadap perempuan.

Suatu pernyataan tegas tentang hak yang harus dipenuhi untuk menjamin penghapusan kekerasan terhadap perempuan dalam segala bentuk, komitmen negara sehubungan dengan tanggung jawabnya, dan komitmen masyarakat internasional secara luas pada penghapusan kekerasan terhadap perempuan, dan mendesak dilakukannya segala upaya agar deklarasi ini diketahui dan dianut secara luas.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar Belakang Masalah dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya polisi dalam mengungkap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga?
2. Hambatan apakah yang dihadapi oleh polisi dalam upaya mengungkap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga?

ISI

A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

1. Pengertian kepolisian

Istilah polisi di beberapa negara memiliki ketidaksamaan, seperti di Yunani istilah polisi dengan sebutan *politeia*, di Inggris dengan sebutan *police* juga dikenal adanya istilah *constable*, di Jerman *polizei*, di Amerika dikenal dengan *sheriff*, di Belanda *politie*, di Jepang dengan istilah *koban* dan *chuzaisho* walaupun sebenarnya istilah *koban* adalah merupakan suatu nama pos polisi di wilayah kota dan *chuzaisho* adalah pos polisi di wilayah pedesaan.

Pengertian kepolisian sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi.

2. Kedudukan dan Struktur Kepolisian

a. Kedudukan kepolisian

Definisi dari kedudukan yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon dalam mengartikan istilah kedudukan lembaga negara, bahwa pertama kedudukan diartikan sebagai posisi suatu lembaga negara dibandingkan dengan lembaga lain, aspek kedua kedudukan adalah posisi suatu lembaga negara didasarkan pada fungsi utamanya. Dari definisi kedudukan tersebut, pembahasan kedudukan kepolisian didekatkan pada arti kedudukan sebagai posisi lembaga didasarkan pada fungsi utamanya

Kedudukan kepolisian tidak diatur secara jelas dan tegas dalam UUD 1945, akan tetapi ketentuan dalam Pasal 30 ayat (5) UUD 1945 mensyaratkan adanya tindak lanjut pembentukan Undang-undang yang mengatur tentang susunan dan kedudukan, hubungan kewenangan Polri dalam menjalankan tugasnya. Konsekuensi logis dari ketentuan Pasal 30 ayat (5) UUD 1945 tersebut dibentuk Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana didalam Undang-undang yang dimaksud lembaga kepolisian diposisikan dibawah Presiden dan bertanggungjawab kepada Presiden.

b. Struktur Kepolisian

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan struktur adalah cara bagaimana sesuatu disusun; susunan atau bangunan,

Setiap organisasi pasti mempunyai struktur baik secara formal maupun secara informal. Struktur formal meliputi bagan organisasi dengan garis otoritas (misalnya kepala, wakil, wakil kepala, kepala-kepala bidang, sub-sub bidang dan lain-lain) Dwight Waldo juga mengemukakan pengertian organisasi, bahwa organisasi adalah struktur antar hubungan pribadi yang berdasarkan atas wewenang formal dan kebiasaan di dalam suatu sistem administrasi.

Pasal 3 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Keputusan Presiden No.70 Tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur bahwa organisasi kepolisian disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai ke kewilayahan. Jenjang di tingkat pusat disebut Markas Besar Kepolsian Negara Republik Indonesia yang disingkat Mabes Polri dan pada tingkat kewilayahan disebut Kepolsian Negara Republik Indonesia Daerah yang disingkat Polda, pada tingkat Kepolsian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) memiliki jenjang ke kesatuan wilayah yang disebut dan disingkat Polwil/Polwiltabes, Polres/Polresta dan Polsek/Polsekta yang setiap jenjang atau tingkatan memiliki unsur-unsur.

3. Tugas dan Wewenang Kepolisian

a. Tugas Kepolisian

Tugas pokok Polri sebagaimana disebutkan Pasal 13 tersebut mendapat perhatian yang serius dari panitia khusus DPR-RI sehingga setelah hasil pembahasan disetujui dalam siding pleno panitia khusus, masih terdapat usulan agar diadakan perubahan urutan mengenai tugas pokok tersebut. Tugas pokok kepolisian yang dimaksud dalam Pasal 13 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tersebut lebih diperinci dalam Pasal 14 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

b. Wewenang Kepolisian

Wewenang Kepolisian yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan, antara lain yaitu wewenang kepolisian yang dirumuskan dalam Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, wewenang kepolisian yang dirumuskan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, wewenang yang dirumuskan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam buku Azas-azas Hukum pidana di Indonesia memberikan suatu pengertian mengenai tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu Hukum Perdata, Hukum Ketatanegaraan, dan Hukum Tata Usaha Pemerintah, yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukum pidana, maka sifat-sifat yang ada dalam suatu tindak pidana adalah sifat melanggar hukum, karena tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum.

Strafbaar feit merupakan istilah asli bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana. Kata *Strafbaar feit* terdiri dari 3 kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

2. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pengertian kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 1 Undang-undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT):

“Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

3. Ruang Lingkup Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Ruang lingkup Kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana yang diatur didalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) adalah:

- a. Suami, istri dan anak.
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan,

persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga, dan atau

- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut (pembantu rumah tangga)

4. Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Adapun bentuk bentuk kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga meliputi:

1. Kekerasan Fisik
2. Kekerasan Psikis
3. Kekerasan Seksual
4. Kekerasan Ekonomi

C. Upaya Polisi Dalam Mengungkap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Upaya Preventif

Adapun berbagai upaya yang di lakukan untuk mencegah dan mengurangi tindakan kekerasan dalam rumah tangga adalah mengefektifkan peraturan dalam hal ini adalah Undang-undang penghapusan kekerasan

dalam rumah tangga dikarenakan keberlakuan Undang-undang itu sendiri belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat untuk sadar akan hukum sebagai suatu tolak ukur bagi masyarakat untuk melawan kejahatan terhadap perempuan dalam rumah tangga dalam wujud pemberian penyuluhan atau sosialisasi yang dilakukan oleh Direktorat Bimnas Polda DIY secara langsung baik dalam tingkat sekolah maupun perguruan tinggi. Selain itu adanya peran masyarakat dalam lingkungan RT/RW dan pemuka agama atau tokoh yang dihormati di wilayah mereka tinggal, pendidikan anak sejak usia dini merupakan suatu pembelajaran dengan memberikan nilai-nilai agama dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat dengan pendidikan moral

2. Upaya Represif

Tindakan yang di ambil oleh kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah pihak kepolisian menyediakan tempat pengaduan dan juga nomor kontak yang bisa dihubungi, pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap korban tindakan kekerasan dalam rumah tangga, adanya pelayanan dari pekerja sosial sebagai salah satu bentuk upaya penanganan tindakan kekerasan dalam rumah tangga, selain itu upaya penanganan dari advokat dengan memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses

peradilan serta mendampingi korban ditingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban

D. Hambatan Polisi Dalam Mengungkap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Demikian hambatan-hambatan yang dialami oleh polisi diantaranya:

1. Hambatan dari korban:
 - a. Setelah korban membuat laporan, korban tidak kooperatif/sulit untuk dihubungi.
 - b. Pencabutan laporan dari korban.
 - c. Pembuktian yang dilakukan oleh polisi terhadap korban sulit.
 - d. Identitas dan alamat korban atau tersangka palsu..
 - e. Korban takut dengan ancaman dari suami.
 - f. Ketergantungan ekonomi dari korban terhadap suami.
 - g. Keterlambatan korban melapor sehingga bukti fisik sudah hilang.
2. Hambatan dari pelaku:
 - a. Pelaku melarikan diri.
 - b. Pelaku tidak mengakui kesalahan atau perbuatannya.
 - c. Pelaku merasa mempunyai bekingan yang kuat /orang besar.

d. Memperlambat proses penyidikan dengan berbagai alasan lain.

3. Hambatan dari keluarga/masyarakat:

Kurangnya kesadaran dari keluarga/masyarakat yang menganggap tindakan tersebut merupakan persoalan keluarga yang bersifat intern keluarga yang dianggap sebagai aib keluarga sehingga sulit untuk memberikan keterangan terhadap pihak yang berwenang (polisi).

4. Hambatan dari Negara:

- a. Sulit untuk mengimplementasikan Undang-undang dikarenakan dengan luas wilayah Indonesia.
- b. Banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang tidak dilaporkan
- c. Kurangnya sarana dan prasarana sehingga sulit untuk mengungkap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
- d. Kurangnya anggaran/ biaya yang diberikan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dilakukan dari hasil penelitian maka penulis berkesimpulan bahwa upaya polisi dalam mengungkap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga belum berjalan secara efektif dikarenakan:

1. Upaya pencegahan (*Preventif*) dan penanganan (*Represif*) dari banyaknya instansi yang melaksanakan sosialisasi sehingga adanya tumpang tindih sosialisasi yang kooperatif dari instansi yang bersangkutan. Adanya keterlambatan penyelesaian kasus KDRT oleh kepolisian yang mengakibatkan terjadinya penumpukan kasus KDRT yang belum selesai dalam 1 tahun. Adanya mediasi dan upaya damai yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, dan permohonan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak suami/istri untuk mengakhiri perkara kekerasan dalam lingkungan keluarga yang mengakibatkan lemahnya penegakan hukum dan sanksi pidana sebagai wujud untuk memberi efek jera kepada pelaku tindak pidana khususnya dalam lingkup keluarga/rumah tangga.
2. Hambatan yang dialami oleh polisi dalam upaya mengungkap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dikarenakan ada beberapa faktor yang menjadi

hambatan dalam upaya untuk mengungkap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, dan masih kentalnya budaya patriarki yang sudah lama ada dan melekat dalam masyarakat kita. Adanya hambatan-hambatan tersebut diantaranya adalah:

- a. Hambatan dari korban
- b. Hambatan dari pelaku
- c. Hambatan dari keluarga/masyarakat
- d. Hambatan dari Negara

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Pihak kepolisian harus melakukan komunikasi dan kordinasi dengan instansi yang terkait dalam hal ini (LSM, LBH, Komnas Perlindungan anak dan perempuan).
2. Pihak kepolisian perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat pada umumnya yang sasarannya adalah keluarga..
3. Perlunya peran penting lembaga-lembaga yang berwenang dalam penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, harus ditingkatkan agar selalu memberikan pendampingan, dan bantuan bagi pihak-pihak yang terlibat terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Achie Sudiarti Luhulima, *Bahan Ajar Tentang Hak Perempuan*, Yayasan Obor Indonesia, anggota IKAPI DKI Jaya.

Adami Chazawi, *Pengantar Hukum Pidana Bag 1*, Grafindo, Jakarta, 2002,

Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, CV Akademika Pressindo, Jakarta,.

Citra Aditya, Bandung 2006

C. W. Supriadi., *Perempuan Dan kekerasan Dalam perkawinan*. Mandar Maju Bandung, 2001.

Dr. Sadjijono, SH, M. Hum, 2005, *Mengenal Hukum Kepolisian*, Laksbang Mediatama, Surabaya,

Drs.H. Pudi Rahardi, M.H, 2007, *Hukum Kepolisian, Profesiomalisme dan Reformasi Polri*, Laks bang Mediatama, Surabaya.

Eko Seriawan.laweducation.com/2011/06/kekerasan dalam rumah tangga-hdrt.html

H. U. Adil Samadani, SHI., SS.,MH, *Kompetensi Pengadilan Agama Terhadap Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Graha Ilmu Yogyakarta.

Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta

Moerti Hadiani Soeroso, 2011, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Prespektif Yiridis-Viktimologi*, Sinar Grafika, Jakarta

Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2003).

Rifka Saraswati, *Perempuan dan Penyelesaian kekerasan Dalam Rumah Tangga*, PT

Sadjijono.2005. *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance*. Yogyakarta, Indonesia: Laksbang

Scharavendijk, van H.J, *Buku Pelajaran tentang Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta, J.B. Wolters, 1996),

S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Cet. 4, (Jakarta: Percetakan BPK Gunung Mulia, 1996),

W.J.S. Purwodarminto, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

Peraturan perundang-undangan:

Undang-undang Dasar Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht, Staatsblad 1915 No73*).

Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga

Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Keputusan Presiden No.70 Tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000 Tentang Peran TNI dan Polri

Website:

<http://artikata.com/arti-355956-upaya.html>

<http://id.wikipedia.org/wiki/Polisi>

<http://id.wikipedia.org/wiki/tindakpidana>

<http://id.wikipedia.org/wiki/kekerasan>

<http://id.wikipedia.org/wiki/keluarga>

<http://midwiferyeducator.wordpress.com>, Istianatur Rosidah M, Kekerasan, Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga.

Kamus:

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, Edisi Ketiga.

